BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Peraktek

Perkembangan di era globalisasi terus meningkat. Arus perekonomian diberbagai belahan dunia menunjukan tingkat peradaban Negara bersangkutan. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat, terutama teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan informasi.

Koperasi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah "badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan". Pengertian sebagai badan usaha menunjukan bahwa koperasi sebagai bentuk kerja sama dibidang ekonomi mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan yang dimaksud dengan berdasarkan prinsip koperasi merupakan esensi dasar kerja koperasi sebagai badan usaha yang lebih mengutamakan kepentingan anggota yang merupakan pemilik sekaligus sebagai pelanggan atau pengguna jasa koperasi.

Tujuan koperasi yang utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba yang diperoleh koperasi. Meskipun

demikian koperasi sebagai badan usaha harus diusahakan agar tidak menderita kerugian. Dalam melaksanakan usahanya, koperasi mengikuti hukum-hukum ekonomi termasuk prinsip efisiensi usaha. Keuntungan yang wajar dalam koperasi merupakan salah satu tujuan yang diharapkan dapat wajar meningkatkan kesejahteraan anggota bersama.

Adanya modal yang cukup memungkinkan koperasi untuk beroperasi seekonomis mungkin, begitu pula sebaliknya. Kelancaran dan kelangsungan usaha sangat tergantung pada kemampuan dalam menggunakan modal yang dimiliki koperasi. SHU (Sisa Hasil Usaha) yang besar bukanlah suatu jaminan bahwa koperasi telah bekerja dengan efisiensi dan produktif. Efisien sangat diperlukan oleh koperasi karena efisiensi akan memungkinkan, koperasi beroperasi seekonomis mungkin.

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib khusus, simpanan 12 Juli, modal donasi, cadangan umum dan hibah. Adapun modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut antara lain anggota dan calon anggota, Koperasi lainnya, Bank dan Lembaga Keuangan, Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dan sumber lain yang sah.

Prosedur merupakan jabatan kongkrit dari kebijakan. Untuk prinsip-prinsip yang berlaku di dalam kebijakan juga berlaku di dalam prosedur. Dari segi

pelaksanaan, prosedur memberikan pedoman atau arah yang jelas tentang apa yan harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Tanpa prosedur yang jelas, suatu pekerjaan akan terlaksanan secara tumpang tindih antara satu unit organisasi dengan unit yang lain. Dengan demikian prosedur merupakan pedoman yang sangat spesifik dan secara rinci menggambarkan langkah-langkah secara kronologis yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.

Pada tahun 1961 di lingkungan Kantor Pemerintah Kota praja Bandung telah berdiri tujuh buah Koperasi Simpan Pinjam yang berada pada beberapa unit kerja. Dengan adanya anjuran Pemerintah Pusat, bahwa pada setiap jawatan/Instansi hanya diperbolehkan satu Koperasi Pegawai, maka Koperasi – Koperasi Simpan Pinjam yang ada disetiap unit kerja sepakat untuk mendirikan satu Koperasi Pegawai.

Pada tanggal 11 Mei 1962 berdirilah Koperasi yang diberi nama Koperasi Pegawai Otonom Kotapraja Bandung disingkat “KPOKB”. Pada tahun 1966 namanya diubah menjadi Koperasi Pegawai Kotamadya Bandung disingkat “KPKB”.

Dengan demikian Koperasi Kotamadya Bandung (KPKB) telah berbadan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Koperasi Propinsi Jawa Barat tertanggal 12 Juli 1963 Nomor : 2840/BH/VI serta telah disesuaikan pula dengan Undang – Undang Nomor : 12 th 1967 dengan Akte penyesuaian tertanggal 6 September 1968 Nomor : 42/BH/IX-19/12-67.

Selama masa 9 (sembilan) tahun KPKB banyak dialami suka duka dan pasang surut, sehingga sampai saat itu usaha Koperasi ini belum memenuhi harapan sebagaimana mestinya.

Hal ini disebabkan karena berbagai faktor antara lain dengan adanya Kebijaksanaan Pemerintah dahulu yang Me-nasakomkan perkoperasian, sehingga fungsi dan peran koperasi diarahkan kepada tujuan politik tertentu, ditambah lagi setelah meletusnya G 30 S / PKI keadaan koperasi pada umumnya praktis tidak berjalan. Disusul kemudian oleh kebijaksanaan Pemerintah dibidang moneter yaitu perubahan nilai rupiah dari Rp.1.000,00 menjadi Rp.1,00. Dengan berlakunya perubahan nilai rupiah itu, maka permodalan koperasi menjadi merosot, sehingga tidak mempunyai arti sama sekali, walaupun demikian berkat kesadaran para anggota KPKB, maka dengan melalui pasang surutnya, sampai sekarang KPKB masih tetap berdiri. Selain itu berkat kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung cq Bapak Walikota Bandung Bapak R. OTJE DJUNDJUNAN yang sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan KPKB. Diharapkan oleh Bapak Walikota agar KPKB dapat menunjang kebijaksanaan pada Kotamadya Bandung dalam rangka usaha meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Dengan latar belakang seperti di atas, penulis melakukan kerja praktek di Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung. Disana penulis mencoba mempelajari apa-apa yang ada disana serta meninjau apa saja kekurangan

koperasi tersebut, penulis mengambil judul tentang **"Prosedur Penggunaan Modal pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB)"**

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun Tujuan dari dilaksanakannya kerja praktek ini adalah untuk :

1. Bagaimana prosedur penggunaan modal pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
2. Hambatan apa saja yang terjadi pada prosedur penggunaan modal pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan di dalam prosedur penggunaan modal pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

A. Kegunaan Operasional

1. Bagi Unit Niaga Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung

   Laporan kerja praktek ini diharapkan menjadi masukan dan sarana bagi Unit Niaga Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung sebagai alat bantu serta masukan yang dapat dipertimbangkan oleh pihak perusahaan dalam proses dan penyelesaian masalah yang terjadi.

2. Bagi Pihak terkait

   Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi masukan dan gambaran bagi pihak yang terkait lainnya dalam melaksanakan prosedur penggunaan modal sehingga dapat membantu memperlancar dan meningkatkan usahanya.

B. Kegunaan Pengembangan Ilmu

1. Bagi Penulis

   Melalui penelitian ini penulis dapat mengembangkan kemampuan, wawasan dan menambah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai prosedur penggunaan modal pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

2. Bagi Peneliti lain

   Hasil pennelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta informasi informasi yang dibutuhkan bagi peneliti lainnya yang memiliki materi bahasan sama, dan penulis berharap laporan selanjutnya akan lebih baik.

3. Bagi pengembangan Ilmu manajemen

   Hasil laporan kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi ilmiah yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu manajemen, khususnya Manajemen Bisnis.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi kerja praktek adalah tempat dimana penulis melaksanakan dan mengadakan kerja praktek secara langsung dengan mempelajari bagian yang diobervasikan serta untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh penulis untuk menunjang judul yang diambil. Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) sendiri berlokasi di Jl. Wastukencana No.5 (belakang) Bandung 40117, Telepon : (022) 420-6476, Fax : (022) 422-4036, e-mail : kpkbinfo@yahoo.co.id. Dan Kerja praktek ini dilakukan selama satu bulan yaitu dimulai dari bulan Juli sampai dengan Agustus.

Tabel 1.1

Rencana dan Pelaksanaan kerja praktek

No	Kegiatan	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Kerja Praktek																								
2	Pelaksanaan Kerja Praktek																								
3	Pengumpulan Data																								
4	Penyusunan laporan Kerja Praktek																								